

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Pada tahun 1965 dalam penetapan presiden No. 1 Indonesia mengakui enam agama resmi yang di anut setiap warga Negara yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Kong Hu Cu. Di pulau bali sendiri mayoritas penduduk memeluk agama Hindu dengan 80% lebih penduduk bali meganut agama Hindu. Namun pada realitanya Bali merupakan salah satu provinsi dengan tingkat kerukunan dan toleransi antar beragama tertinggi di Indonesia. Hal ini menjadikan Bali memiliki tempat tersendiri bagi terjaminnya toleransi antar umat beragama salah satunya agama Buddha.

Agama Buddha tidaklah asing bagi masyarakat Bali, karena di pulau ini pernah tercatat berkembang agama Siwa-Buddha. Catatan ini membuktikan agama Buddha pernah menjadi salah satu agama masyarakat Bali dan membuktikan pula bahwa agama Buddha memiliki landasan filosofi moral cinta kasih yang universal sehingga mampu hidup berdampingan dan menyatu dengan agama-agama (sekte-sekte) lain secara harmonis.

Banyak tokoh Buddhis di Bali yang tercatat memiliki peran amat penting dalam menata sosial kemasyarakatan, misalnya Mpu Kuturan, Mpu Nirarta (Dang Hyang Nirarta kemudian menyebarkan Siwa, yang dalam praktik hidupnya masih kental dipengaruhi oleh filosofi Buddha), Mpu Astapaka, dan lain-lainnya.

Bahkan keturunan Mpu Astapaka (merupakan keponakan Dang Hyang Nirarta) hingga kini masih jelas identitas Buddhisnya.

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BULELENG Jl. Dewi Sartika No. 25, Buleleng-Bali Telepon: (0362) 28554			
No.	Nama Vihara	Alamat	Jumlah KK
1	Brahma Vihara Arama	Banjar Tegeha, Desa Banjar, Kecamatan Banjar	38
2	Vihara Dharma Rangsi	Desa Pamaron, Kecamatan Buleleng	23
3	Vihara Giri Manggala	Desa Alasangker, Kecamatan Buleleng	45
4	Vihara Samyag Dresti	Desa Penglatan, Kecamatan Buleleng	29
5	Vihara Samyag Darsana	Desa Petandakan, Kecamatan Buleleng	32
6	Vihara Buddhavamsa	Kampung Tinggi, Singaraja	26
7	Vihara Velluyana	Desa Bontihing, Kecamatan Kubutambahan	18
8	Vihara Metta Arama	Temukus, Kecamatan Buleleng	17
9	Mahacetya Buddha Manggala	Banyuasri, Singaraja	12

Gambar 1.1
 Data Vihara Kabupaten Buleleng
 (Sumber: Kemenag Kab. Buleleng Tahun 2021)

Vihara merupakan tempat ibadah bagi umat Buddha. Menurut data Kementerian Agama Kabupaten Buleleng tahun 2021, Kabupaten Buleleng memiliki total 9 vihara yang tersebar di 3 kecamatan. Salah satunya yang terletak di Kecamatan Banjar yaitu Brahma Vihara Arama Banjar. Vihara ini berdiri dan di resmikan pada tahun 1971 di kabupaten Buleleng dan menjadi vihara pertama

di provinsi Bali. Jumlah umat Buddha di vihara ini berjumlah 38 kepala keluarga yang tersebar di beberapa desa di sekitar desa banjar dan beberapa umat ada yang berada di luar kota. Aktivitas yang terjadi di vihara ini antara lain kegiatan

Meditasi, Puja Bakti, kegiatan operasional, Sekolah Minggu dan kegiatan kesenian seperti Sekaa Gong. Seluruh aktivitas yang terjadi di Brahma Vihara berasal dari sumbangan donator, penjualan tiket masuk bagi wisatawan, dana pemerintah dan iuran-iuran dari umat Buddha yang di sepakati bersama.

Praktek akuntansi berupa iuran yang terjadi di Brahma Vihara Arama sangat menarik untuk diteliti. Iuran yang di lakukan di Brahma Vihara Arama adalah iuran dana abadi yang di gunakan sebagai jaminan atau asuransi jika ada umat yang meninggal dan akan diberikan berupa premi kepada keluarga yang berduka cita. Sebagai vihara pertama yang berdiri di Kabupaten Buleleng menjadikan Brahma Vihara Arama menjadi kiblat bagi vihara-vihara lainnya di kabupaten buleleng baik dari sisi spiritual sampai pengelolaan manajemen vihara. Brahma Vihara Arama merupakan satu-satunya vihara yang menerapkan sistem iuran dana abadi di Kabupaten Buleleng. Vihara-vihara lain yang ada di Kabupaten Buleleng belum menerapkan iuran dana abadi yang diterapkan oleh Brahma Vihara Arama, melainkan vihara lainnya pada saat terjadinya kematian, vihara lain melakukan proses kremasi dan semua pendanaan akan ditanggung langsung oleh keluarga yang sedang berduka.

Vihara lain juga hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah untuk menanggung semua biaya operasional vihara mulai dari pembiayaan listrik sampai renovasi vihara jika terdapat beberapa bangunan yang perlu di perbaiki.

Praktek iuran yang dijalankan Brahma Vihara Arama dan menjadi satu-satunya vihara yang menjalankan sistem dana abadi berupa iuran sebagai asuransi yang akan di peroleh keluarga yang sedang berduka secara tidak langsung mengurangi beban keuangan bagi keluarga yang sedang berduka untuk memenuhi keperluan kremasi. Karena hal unik ini peneliti tertarik untuk meneliti tentang akuntabilitas dan transparansi terkait pengelolaan dana abadi yang terjadi di Brahma Vihara Arama.

Setiap agama mempunyai tata cara yang berbeda jika ada salah satu umatnya meninggal dunia. Di dalam Agama Buddha sendiri proses yang wajib dilakukan jika ada umat yang meninggal adalah dengan dilakukan upacara *Avamanggala* yang diawali dengan puja bakti dirumah duka, pemandian jenazah, sampai nanti di kremasi. Dalam proses upacara *Avamanggala* diperlukan biaya yang tidak sedikit, mulai dari pembelian bahan-bahan upacara puja bakti, sampai biaya kremasi mulai dari pembelian peti hingga membayar uang jasa kremasi. Hal ini tentu akan sangat membebani bagi keluarga yang sedang berduka. Dengan berbagai masukan dan keluhan dari umat maka dari itu Brahma Vihara Arama dan dengan kesepakatan umat pada saat itu dibuatlah dana abadi yang berupa iuran per bulannya sebagai asuransi yang dapat diperoleh ketika ada umat yang meninggal.

Dana abadi sendiri merupakan kumpulan kas yang diperoleh dan disimpan dalam bentuk investasi dengan tujuan untuk penyediaan pelayanan pada instansi atau Entitas Berorientasi Nonlaba baik itu tempat ibadah, institusi akademi seperti sekolah dan universitas. Menurut Ketua Brahma Vihara Arama, pembentukan dana abadi di Brahma Vihara Arama dilatarbelakangi oleh keluhan dari umat yang meminta solusi dari vihara karena masalah ekonomi yang dimana

setiap ada acara keagamaan seperti acara kematian yang memerlukan biaya yang tidak sedikit. Mendengar hal itu pihak vihara akhirnya memutuskan untuk membuat iuran wajib sebesar 10.000,- perbulan yang dibebankan kepada kepada umat. Kemudian nantinya iuran ini dapat digunakan ketika ada umat meninggal. Iuran dana abadi tidak hanya dibebankan kepada umat, tetapi iuran dana abadi juga berasal dari pendapatan Vihara dari penjualan tiket masuk, sumbangan-sumbangan dan bantuan dari pemerintah dengan alokasi sebesar Rp.10.000.000,- per tahunnya. Besaran iuran Dana Abadi yang di sepakati oleh umat dan juga pengurus Brahma Vihara Arama adalah sebesar Rp.10.000,- setiap bulannya dan di serahkan langsung kepada bendahara Brahma Vihara Arama. Dari prosesi kremasi dan pembuangan abu ke laut pihak keluarga akan dibantu dari dana abadi tersebut. Jika masih ada kakurangan dana dari pihak Brahma Vihara Arama akan menalangi kekurangan biaya tersebut. Hal ini tentu akan sangat membantu pihak keluarga dengan adanya dana abadi jika dibandingkan vihara lain yang tidak menerapkan iuran dana abadi seperti di Brahma Vihara Arama.

Tabel 1.1
Data Pengelolaan Iuran Dana Abadi Brahma Vihara
Periode 2017-2021
(Sumber: Brahma Vihara Arama)

DATA IURAN DANA ABADI BRAHMA VIHARA ARAMA BANJAR (dalam ribuan)					
	2017	2018	2019	2020	2021
PEMASUKAN	14.560	14.560	14.560	4.560	9.560
PENGELUARAN	-	2.000	-	6.000	2.000
TOTAL SALDO	178.400	190.960	205.520	204.080	211.640

Tabel 1.2
Data Pengelolaan Kas Brahma Vihara
Periode 2017-2021
(Sumber: Brahma Vihara Arama)

DATA KAS BRAHMA VIHARA ARAMA 5 TAHUN TERAKHIR (dalam ribuan)			
Tahun	Keterangan	Jumlah	Saldo
2017	Kas Awal Tahun		<u>Rp. 654.754</u>
	Pemasukan:		
	1 Tiket Masuk	Rp. 91.250	Rp. 91.250
	2 Dana Sukarela	Rp. 15.955	Rp. 15.955
	3 Donatur	Rp. 35.000	Rp. 35.000
	4 Bantuan Pemerintah	Rp. 15.000	Rp. 15.000
	Total Pemasukan		<u>Rp. 157.205</u>
	Pengeluaran:		
	1 Biaya Operasional	Rp. 23.575	Rp. 23.575
	2 Gaji Karyawan	Rp. 11.250	Rp. 11.250
3 Pengadaan Sarpras	Rp. 6.540	Rp. 6.540	
4 Peremajaan Bangunan	Rp. 20.439	Rp. 20.439	
Total Pengeluaran	Rp. 20.439	<u>Rp. 61.804</u>	
	Saldo Akhir Tahun		<u>Rp. 750.155</u>
2018	Kas Awal Tahun		<u>Rp. 750.155</u>
	Pemasukan:		
	1 Tiket Masuk	Rp. 79.980	Rp. 79.980
	2 Dana Sukarela	Rp. 10.548	Rp. 10.548
	3 Donatur	Rp. 37.000	Rp. 37.000
	4 Bantuan Pemerintah	Rp. 15.000	Rp. 15.000
	Total Pemasukan		<u>Rp. 142.528</u>
	Pengeluaran:		
	1 Biaya Operasional	Rp. 35.985	Rp. 35.985
	2 Gaji Karyawan	Rp. 11.250	Rp. 11.250
3 Pengadaan Sarpras	Rp. 5.960	Rp. 5.960	
4 Peremajaan Bangunan	Rp. 15.750	Rp. 15.750	
5 Pembangunan Aula Ibadah	Rp. 112.738	Rp. 112.738	
Total Pengeluaran		<u>Rp. 181.683</u>	
	Saldo Akhir Tahun		<u>Rp. 711.000</u>
2019	Kas Awal Tahun		<u>Rp. 711.000</u>
	Pemasukan:		
	1 Tiket Masuk	Rp. 81.870	Rp. 81.870

2	Dana Sukarela	Rp. 19.980	Rp. 19.980
3	Donatur	Rp. 54.000	Rp. 54.000
4	Bantuan Pemerintah	Rp. 15.000	<u>Rp. 15.000</u>
Total Pemasukan			<u>Rp. 170.850</u>
Pengeluaran:			
1	Biaya Operasional	Rp. 15.575	Rp. 15.575
2	Gaji Karyawan	15.575	Rp. 11.250
3	Pengadaan Sarpras	Rp. 11.250	Rp. 2.405
4	Peremajaan Bangunan	Rp. 2.405	<u>Rp. 4.870</u>
Total Pengeluaran		Rp. 4.870	<u>Rp. 34.100</u>
Saldo Akhir Tahun			<u>Rp. 847.750</u>



Kas Awal Tahun		<u>Rp. 847.750</u>
Pemasukan:		
1 Tiket Masuk	Rp. 16.725	Rp. 16.725
2 Dana Sukarela	Rp. 4.537	Rp. 4.537
3 Donatur	Rp. 30.000	Rp. 30.000
4 Bantuan Pemerintah	Rp. 10.000	<u>Rp. 10.000</u>
Total Pemasukan		<u>Rp. 61.262</u>
Pengeluaran:		
1 Biaya Operasional	Rp. 31.575	Rp. 31.575
2 Gaji Karyawan	Rp. 11.250	Rp. 11.250
3 Pengadaan Sarpras	Rp. 18.405	Rp. 18.405
4 Peremajaan Bangunan	Rp. 22.870	Rp. 22.870
5 Pembangunan Area Taman Atas	Rp. 69.912	<u>Rp. 69.912</u>
Total Pengeluaran		<u>Rp. 154.012</u>
Saldo Akhir Tahun		<u>Rp. 755.000</u>
Kas Awal Tahun		<u>Rp. 755.000</u>
Pemasukan:		
1 Tiket Masuk	Rp. 11.725	Rp. 11.725
2 Dana Sukarela	Rp. 495	Rp. 495
3 Donatur	Rp. 35.000	Rp. 35.000
4 Bantuan Pemerintah	Rp. 5.000	<u>Rp. 5.000</u>
Total Pemasukan		<u>Rp. 52.220</u>
Pengeluaran:		
1 Biaya Operasional (listrik, air dan lainnya)	Rp. 24.520	Rp. 24.520
2 Gaji Karyawan	Rp. 11.250	Rp. 11.250
3 Pengadaan Sarpras	Rp. 12.580	Rp. 12.580
4 Peremajaan Bangunan	Rp. 13.870	<u>Rp. 13.870</u>
Total Pengeluaran		<u>Rp. 62.220</u>
Saldo Akhir Tahun		<u>Rp. 745.000</u>

Pengelolaan keuangan yang baik akan membuat segala sesuatu menjadi lebih mudah, ditambah dengan manajemen administrasi yang efektif juga akan memberikan kemudahan dalam proses pengelolaan dana abadi. Hal ini sangat penting dilakukan dalam praktek akuntansi seperti pengelolaan iuran dana abadi. Sumber Daya Manusia yang berkualitas juga menjadi faktor penting dalam pengelolaan keuangan. Dalam hal pengelolaan dana abadi di Brahma Vihara Arama pengurus vihara merupakan bagian penting dalam pengelolaan dana abadi. Pengelolaan yang efektif akan mencerminkan kinerja pengurus dalam mengelola

keuangan umat. Namun jika dalam pelaksanaan dan praktek iuran terjadi kecurangan atau ketidaksesuaian pencatatan dan sebagainya tentu saja pengurus vihara akan di cap tidak baik dan dapat menimbulkan fitnah sampai hilangnya kepercayaan umat terhadap pengurus. Salah satu solusi untuk mencegah hilangnya kepercayaan umat kepada pengurus adalah dengan adanya laporan atau publikasi pengelolaan keuangan kepada umat secara periodik. Maka dari itu konsep Akuntabilitas dan Transparansi harus diterapkan oleh pengurus vihara guna menjaga kepercayaan dari umat. Dalam suatu organisasi Akuntabilitas dan Transparansi menjadi hal yang sangat penting dalam mengelola keuangan organisasi. Baik itu di pemerintah maupun non pemerintahan.

Dunia akuntansi bukan merupakan hal yang awam lagi bagi masyarakat umum. Pengelolaan keuangan sekarang menjadi hal yang sangat penting di segala kegiatan masyarakat. Pengelolaan keuangan tidak akan pernah terlepas dari prinsip akuntansi. Akuntansi merupakan sebuah seni dalam menyusun dan mengolah data-data keuangan hingga menghasilkan sebuah laporan keuangan atau informasi keuangan yang digunakan pemangku kepentingan untuk mengambil sebuah keputusan (Dewi, 2019). Brahma Vihara Arama sendiri dengan kekayaan dari asset maupun kas yang begitu besar tentu saja memiliki catatan laporan keuangan untuk menunjang keberlangsungan operasional di Brahma Vihara Arama. Karena dengan adanya laporan keuangan dan di tambah dengan adanya prinsip Akuntabilitas dan Transparansi yang baik, sebuah organisasi akan dapat berjalan dan berkembang dengan baik pula. Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi yang sudah diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan akan menghasilkan sebuah informasi keuangan yang jujur dan dapat di

pertanggungjawabkan oleh pengurus Brahma Vihara Arama. Namun pada kenyataannya di lapangan banyak dari umat yang tidak mengetahui besaran kas yang ada pada iuran tersebut, berapa total asset yang dimiliki Brahma Vihara Arama dan bagaimana mekanisme pelaporan keuangan pada Brahma Vihara Arama itu masih kurang jelas. Pada saat peneliti melakukan observasi dan bertanya perihal keuangan di Brahma Vihara Arama kebanyakan umat tidak mengetahui tentang keuangan di Brahma Vihara Arama. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibuk Warti salah satu umat di Brahma Vihara Arama :

“ Kalau masalah keuangan dan kekayaan di Brahma Vihara Arama bapak kurang tau dik. Soalnya semua di serahkan langsung ke pengurus. Kewajiban kita hanya membayar tiap bulannya. Kalau dik mau tau bisa langsung datang ke pengurus Viharanya langsung. Nanti disana pasti dijelaskan berapa kekayaan dari Brahma Vihara Arama.”

Beberapa umat juga menjawab dengan jawaban yang hampir sama persis ketika ditanya masalah keuangan yang ada di Brahma Vihara Arama. Namun ada hal yang unik di Brahma Vihara Arama yaitu umat tidak mempermasalahkan tentang keuangan yang ada di Brahma Vihara Arama, meskipun dari pihak pengurus Vihara terkadang tidak memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap keuangan vihara. Mereka hanya mempercayakan pengelolaan keuangan vihara kepada pengurus dan sampai saat ini tidak pernah terjadi konflik atau masalah tentang posisi keuangan vihara. Karena didalam agama Buddha terdapat ajaran tentang keyakinan (*saddha*) yang di terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan di terapkan dalam berorganisasi. Hal ini sudah dilakukan umat Buddha di Brahma Vihara Arama sebagai dasar untuk memperkokoh keyakinan sebagai

umat Buddha yang baik. Hal tersebut juga selaras dengan Teori *Stewardship* yang di jelaskan oleh Hernandez, (2008) dimana Teori *Stewardship* berfungsi sebagai mekanisme pertanggungjawaban untuk bisa memberikan keyakinan, audit, serta pelaporan yang jelas sehingga nantinya tujuan dari organisasi tersebut dapat tercapai. Teori ini lebih menekankan pada pelayanan yang dilakukan *steward* kepada organisasi dan lebih menekankan kepentingan kelompok dibanding kepentingan pribadi. Teori ini juga mencerminkan sikap dan perilaku seseorang untuk dapat memposisikan tanggungjawabnya diatas kepentingan kelompok disbanding kepentingan individu yang berdampak pada *stakeholder* yang dalam penelitian ini adalah umat Brahma Vihara Arama Banjar.

Penelitian tentang pengelolaan keuangan yang dilakukan Lestari, (2014) menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban di *Desa Pakraman* Kubutambahan tidak melibatkan seluruh anggotanya, melainkan hanya diwakili oleh beberapa orang perwakilan. Akuntabilitas yang di terapkan berlangsung secara konsisten dan pelaporan keuangan diterapkan secara sederhana tiap bulannya (menggunakan sistem kredit, debit, dan saldo). Penelitian lain yang dilakukan Mahasari, (2017) menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan dan pembentukan *sekaa* didasari atas keasamaan tujuan, sistem pengelolaan keuangan tidak terlepas dari kearifan lokal *pade demen*, eksistensi keberadaan *sekaa* dapat dipertahankan dengan modal sosial yang terjalin sangat kuat pada prinsip *pang pada payu* dalam penyelesaian Kredit Macet.

Menurut Grey et al (2016), dalam Randa (2011) Akuntabilitas merupakan hak masyarakat atau kelompok dalam masyarakat yang tumbuh karena adanya suatu hubungan antara organisasi dan masyarakat. Penelitian tentang Akuntabilitas yang

dilakukan oleh Darmada, (2016) menyatakan bahwa proses pengelolaan keuangan melibatkan *prajuru subak*, proses pengelolaan keuangan terbagi menjadi pengelolaan secara internal dan eksternal, pertanggungjawabannya dilakukan dengan sederhana, serta praktik akuntabilitas tidak lepas dari kearifan lokal *pade gelahang*. Penelitian lain yang berkaitan dengan Akuntabilitas yang dilakukan oleh Herawati dan Atmaja, (2017) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban yang dilakukan di Pura Khayangan Tiga, Desa Pakraman Bondalem, sudah dilakukan secara efektif. Akutabilitas yang diterapkan pengurus Pura Khayangan Tiga Desa Pakraman Bondalem, berupa laporan pertanggungjawaban yang dibuat secara rinci mengenai pengeluaran keuangan pada saat *karya* (upacara) atau pembangunan di pura.

Penelitian terkait dengan Akuntabilitas dan Transparansi yang dilakukan oleh Handayani (2017), menyatakan bahwa pemasukan keuangan yang diperoleh Desa Pakraman Bangkang berasal dari pemasukan regular berupa *peturunan* (iuran wajib). Sedangkan pemasukan non regular berasal dari sumbangan organisasi pihak ketiga, *dana punia* (iuran wajib), dan *sesari*. Pelaporan keuangan yang dilakukan oleh pengurus Desa Pakraman Bangkang adalah berupa laporan pertanggungjawaban secara lisan. Alasan tidak dibuatnya laporan keuangan oleh pengurus adalah transaksi yang tidak rutin terjadi, lingkup organisasi yang relatif kecil, kompetensi dari warga Desa Pakraman Bangkang yang masih kurang.

Berdasarkan fenomena dan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melihat bagaimana pengelolaan keuangan serta ingin mengetahui Akuntabilitas dan Transparansi yang diterapkan di Brahma Vihara Arama Banjar dengan alasan pengelolaan keuangan yang dilakukan di Brahma

Vihara Arama Banjar sendiri hanya melibatkan pengurus Vihara saja namun dilain sisi sampai saat ini tidak pernah terjadi konflik mengenai pengelolaan keuangan di Brahma Vihara Arama Banjar serta banyaknya umat yang tidak mengetahui keuangan dan kekayaan yang dimiliki Brahma Vihara Arama. Selain itu Brahma Vihara Arama Banjar merupakan Vihara pertama yang berdiri di Kabupaten Buleleng dan menjadi Vihara terbesar di Pulau Bali. Dengan fakta diatas tentunya kekayaan yang dimiliki Brahma Vihara Arama Banjar sangat besar dan perlu adanya transparansi dan akuntabilitas yang baik, karena dengan jumlah kekayaan dan jumlah umat yang banyak namun tidak pernah terjadi konflik di internal Brahma Vihara Arama Banjar. Melihat fenomena tersebut, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Abadi di Brahma Vihara Arama, Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, bahwa umat Brahma Vihara Arama Banjar masih banyak yang tidak mengetahui tentang keuangan dan kekayaan yang dimiliki Brahma Vihara Arama Banjar. Hal ini tentu secara otomatis menjelaskan bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pengurus Brahma Vihara Arama Banjar masih kurang jelas dalam menerapkan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam pengelolaan keuangan di Brahma Vihara Arama Banjar.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang dijelaskan diatas, maka peneliti dapat membatasi masalah pada sistem pengelolaan keuangan dengan penerapan

prinsip Akuntabilitas dan Transparansi yang di lakukan pengurus Brahma Vihara Arama Banjar.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah diatas maka peneliti dapat membuat rumusan masalah Bagaimana Mekanisme Pengelolaan Dana Abadi, Implementasi Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi serta Kesesuaian Laporan Keuangan dengan ISAK 35 yang terjadi di Brahma Vihara Arama Banjar?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang di jelaskan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pengelolaan dana abadi , Implementasi Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi serta Kesesuaian Laporan Keuangan Dengan ISAK 35 yang terjadi di Brahma Vihara Arama

